
Ciuta Ekonomika

Jurnal Ekonomi

Volume VIII, Nomor 1, Mei 2014
ISSN: 1978-3612

Terbit dua kali setahun, pada bulan Mei dan Desember, berisi tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian ilmiah di bidang ilmu ekonomi dalam berbagai aspek kajian

Pemimpin Redaksi:
Maryam Sangadji

Wakil Pemimpin Redaksi:
Yerimias Manuhutu

Redaktur Pelaksana:
Jeann B. Nikijuluw
Mohammad R. Serang

Wakil Redaktur Pelaksana:
Bin Raudha Hanoeboen
Aziz Laitupa

Tim Editor:
Maria K. Tupamahu
Sherly Ferdinandus
Mohammad Ridwan Assel

Penyunting Ahli:
Stellamaris Metekohy
Latif Kharié
Erly Leiwakabessy
Asmaria Latuconsina
H. Muspida
Muhammad Bugis



**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi
Universitas Pattimura**

Alamat Redaksi
Lt.2 Kampus Fak. Ekonomi Unpatti
Jln. Ir. M. Putuhena, Poka-Ambon
K.P. 97233, Telp 0911-322579
e-mail: cita.ekonomika@gmail.com

Redaksi menerima sumbangan artikel yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Format artikel harus sesuai dengan petunjuk penulisan yang tercantum di halaman belakang jurnal ini. Naskah yang masuk akan dievaluasi, ditelaah dan disunting untuk menyeragamkan format penulisan, gaya selingkung serta demi menjaga kualitas isi jurnal

**PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
TAHUN 1990 – 2012**

Lillyani Margaretha Orisu

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Papua, Manokwari

Abstract

Aims of this study to analysis the government expenditure in the region of Manokwari. Using secondary data from BPS, Bappeda and Dispenda. Estimation method that used in this research is ordinary least square.

Results shows that government expenditure is significantly affecting by real income of Manokwari region and central government transfer funds. Population in Manokwari and unemployment rate doesn't affecting government expenditure significantly.

Keywords: *government expenditure, cental government transfer fund.*

I. PENDAHULUAN

Dalam konteks perekonomian suatu negara, salah satu wacana yang menonjol adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada juga wacana lain mengenai pengangguran, inflasi, kemiskinan, pemerataan pendapatan dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks perekonomian suatu negara karena dapat menjadi salah satu ukuran dari pertumbuhan atau pencapaian kinerja perekonomian negara tersebut. Musgrave mengemukakan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, pemerintah sebagai fasilitator pembangunan menempuh berbagai kebijakan ekonomi yang sejauh mungkin mampu menciptakan iklim kondusif bagi kegiatan-kegiatan produktif untuk semua pelaku ekonomi, anggaran belanja merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal mempengaruhi mekanisme perekonomian melalui fungsi anggaran sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi (Wiralaga, 2005).

Kebijakan otonomi daerah memberi peluang bagi perubahan paradigma pembangunan yang semula lebih mengedepankan pencapaian pertumbuhan menjadi pemerataan dengan prinsip mengutamakan keadilan dan perimbangan. Semangat perubahan paradigma tersebut oleh pemerintah ditindaklanjuti dengan terbitnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Terbitnya undang-undang tersebut merupakan langkah yang akomodatif dan strategis dalam menjawab berbagai permasalahan yang muncul di daerah antara lain meliputi permasalahan kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Selain itu, kondisi ini membuka peluang bagi daerah untuk memperkuat basis perekonomian daerah guna menyongsong era globalisasi ekonomi. Indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai hal, antara lain adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun arah dan kebijakan di bidang keuangan, peningkatan penerimaan pendapatan daerah serta pembangunan dan penyediaan berbagai fasilitas pelayanan publik bagi masyarakat setempat. Idealnya dalam kerangka otonomi daerah setiap pemerintah daerah mampu membiayai setiap kebutuhan daerahnya termasuk penyediaan fasilitas pelayanan publik dengan sumber penerimaan terbesar berasal dari pendapatan daerah termasuk dari PAD, namun yang terjadi justru sebaliknya sumber penerimaan terbesar berasal dari transfer pemerintah pusat. Untuk lebih jelasnya tentang kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelayanan publik tercermin dari proporsi Belanja Modal bagi kepentingan pelayanan publik terhadap total penerimaan pendapatan dan pengeluaran daerah Kabupaten Manokwari periode 2004-2013 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Grafik 1. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah, PAD dan Transfer Pemerintah Pusat di Kabupaten Manokwari

Grafik di atas menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Manokwari pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 929.441 juta dimana dari jumlah pengeluaran pemerintah ini sumbangan dari PAD adalah sebesar 2,79 persen sedangkan sumbangan dari transfer pemerintah pusat adalah sebesar 86,73 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari terhadap tranfer pemerintah pusat masih relatif tinggi untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Terlihat dari perkembangan dana transfer pemerintah yang setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan dengan proporsi yang besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan PAD sehingga tujuan dari dana transfer pemerintah pusat sebagai “saran edukasi” bagi pemerintah daerah belum tercapai. Sesungguhnya pemerintah diharapkan terdorong secara intensif maupun ekstensif dalam menggali potensi sumber-sumber penerimaannya dalam merangsang pertumbuhan ekonomi lebih cepat lagi. Pemerintah daerah seyogyanya lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal, melakukan alokasi yang lebih efisien pada berbagai potensi lokal yang sesuai dengan kebutuhan publik. Peningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal lebih cepat terwujud dan pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini berarti, idealnya pelaksanaan otonomi daerah harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri, yang salah satunya diindikasikan dengan meningkatnya kontribusi daerah dalam hal pembiayaan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan maka yang menjadi pertanyaan menarik untuk diteliti adalah berapa besar pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), transfer pemerintah pusat, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terhadap pengeluaran pemerintah daerah di Kabupaten Manokwari?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar pengaruh pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terhadap pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Manokwari.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Otonomi Daerah

Sesuai dengan amanat yang digariskan dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Nyata dalam arti bahwa pemberian otonomi didasarkan pada faktor-faktor perhitungan dan tindakan atau kebijakan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan mampu mengurus rumah tangganya sendiri. *Bertanggung jawab* berarti pemberian otonomi benar-benar sejalan dengan tujuan untuk melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan serasi dengan pembinaan politik dengan kesatuan bangsa. Dengan demikian akan terjalin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan indikator penting dalam mengukur tingkatan otonomi daerah. Sumber keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber non Pendapatan Asli Daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dapat dicapai apabila sumber keuangan daerah dapat membiayai aktifitas daerah yang berasal dari PAD.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan rumah tangganya memerlukan sumber pendapatan yang berasal dari PAD. Tanpa adanya dana yang cukup, maka ciri pokok dari otonomi daerah menjadi hilang. Meskipun daerah juga mendapatkan sumber-sumber dari PAD, namun PAD mempunyai peranan yang strategis di dalam keuangan daerah karena bagi suatu daerah sumber pendapatan daerah merupakan tiang utama penyangga kehidupan daerah. Oleh karena itu para ahli sering memakai PAD sebagai alat analisis dalam menilai tingkat otonomi suatu daerah.

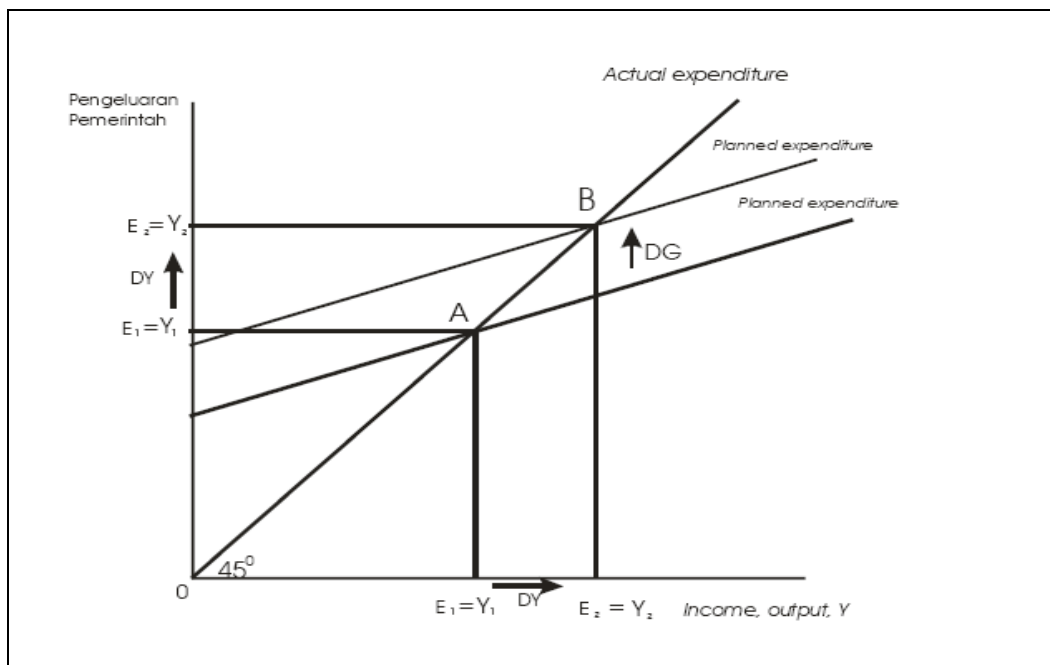
Pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai keuangan dengan otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya tentu membutuhkan dana. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya faktor keuangan untuk melaksanakan otonomi daerah, karena tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya, sehingga membutuhkan sumber keuangan yang memadai untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggali sumber PAD, dengan tujuan agar ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Semakin besar prosentase PAD terhadap pengeluaran daerah, maka otonomi daerah dapat dikatakan semakin baik. Agar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Namun mengingat tidak semua sumber-sumber pembiayaan

dapat diberikan kepada daerah maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, 2001). Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam Keynesian Cross (Mankiw, 2003).



Grafik 2. Pengeluaran Pemerintah pada *Keynesian Cross*

Pada grafik 2, dapat dilihat peningkatan pengeluaran pemerintah berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat output. Peningkatan besarnya pengeluaran pemerintah berhasil merubah keseimbangan dari titik A ke titik B, yang berarti peningkatan pertumbuhan (Y).

Bailey (1995) membagi teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah menjadi dua, yaitu teori makro dan teori mikro. Model makro dapat menjelaskan

perhitungan jangka panjang pertumbuhan pengeluaran pemerintah, sedangkan model mikro menjelaskan perubahan secara *particular* komponen-komponen pengeluaran pemerintah. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu (Mangkoesobroto, 2001):

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah.
2. Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah.
3. Teori Peacock & Wiseman.

Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, prosentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan dalam *Mangkoesobroto* (2001), bahwa pembangunan ekonomi aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Hukum Wagner

Teori Wagner tentang perkembangan pengeluaran pemerintah disebut sebagai *Wagner law of increased government activity*. Teori ini mengemukakan perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap GNP, dimana teori ini didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, US, dan Jepang pada abad ke-19 (Mangkoesobroto, 2001). Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum Wagner, sebagai berikut Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :

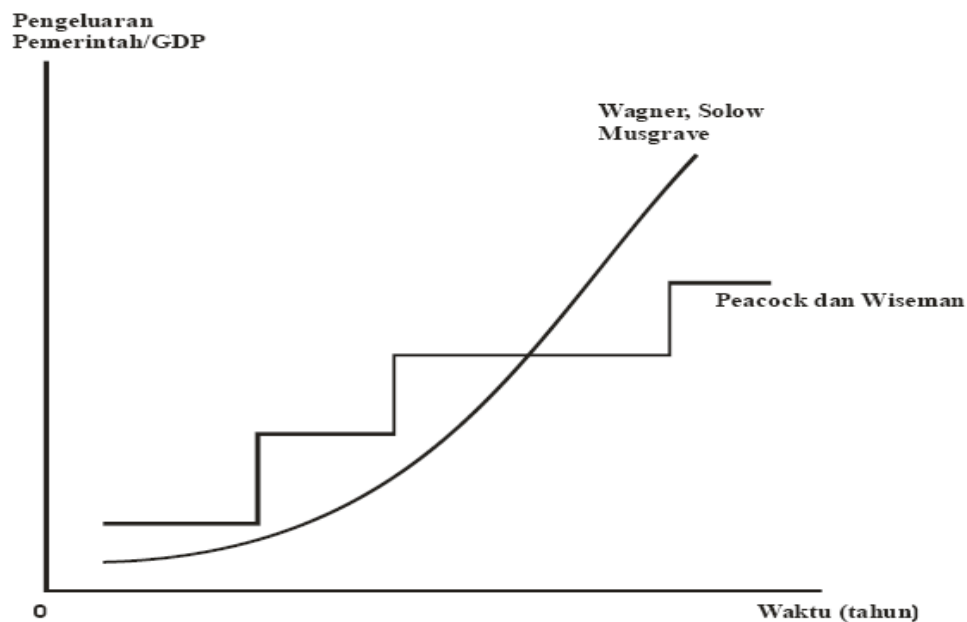
$$\frac{P_k PP_1}{PPK_1} < \frac{P_k PP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{P_k PP_n}{PPK_n}$$

$P_k PP$ = Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK = Pendapatan per kapita

1,2,...,n = jangka waktu (tahun)

Perbedaan pandangan antara versi Wagner dengan versi Peacock dan Wiseman dapat dilihat pada grafik 3 berikut ini.



Grafik 3. Perbedaan Pengeluaran Pemerintah Versi Wagner dan Peacock & Wiseman

Sumber-sumber Pembiayaan Keuangan Daerah

Pembiayaan keuangan daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pembiayaan, penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, dan DPRD dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi. Terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri atas; Pajak daerah, Retribusi daerah, BUMD, Pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain yang sah.

- 2) Dana Perimbangan, terdiri atas; Dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum, Dana alokasi khusus.
- 3) Pinjaman Daerah, terdiri atas; Pinjaman dalam negeri dan luar negeri.
- 4) Penerimaan Lain-lain yang sah

Sumber-sumber Pembiayaan Keuangan Daerah
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
<ul style="list-style-type: none"> a.) Hasil Pajak Daerah b.) Hasil Retribusi Daerah c.) Hasil BUMD d.) Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan
2. DANA PERIMBANGAN
<ul style="list-style-type: none"> a.) Dana Bagi Hasil (DBH) <ul style="list-style-type: none"> - Bagian daerah dari penerimaan PBB - Bagian daerah dari penerimaan BPHTB - Bagian daerah dari penerimaan SDA: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertambangan Umum: <ul style="list-style-type: none"> ▫ iuran tetap (landrent) ▫ iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalty) ▪ Minyak Bumi: <ul style="list-style-type: none"> ▫ royalty minyak bumi ▪ Gas Bumi: <ul style="list-style-type: none"> ▫ royalty gas bumi ▪ Panas Bumi: <ul style="list-style-type: none"> ▫ setoran bagi pemerintah ▫ royalty panas bumi ▪ Kehutanan: <ul style="list-style-type: none"> ▫ IHPH (Iuran Hak Penguasaan Hutan) ▫ PSDH (Provisi Sumber Data Hutan) ▫ Dana Reboisasi ▪ Perikanan: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) ▫ Pungutan Hasil Perikanan (PHP) b.) Dana Alokasi Umum (DAU) c.) Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. PINJAMAN DAERAH YANG TERDIRI ATAS PINJAMAN
<ul style="list-style-type: none"> a.) Dalam Negeri b.) Luar Negeri
4. PENERIMAAN LAIN-LAIN YANG SAH

Sumber: Undang-undang No. 33 Tahun 2004

Dana Transfer Pemerintah Pusat

Dana perimbangan adalah merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana

Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Berjalannya sistem transfer dalam DBH mencerminkan adanya otonomi yang seluas-luasnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dana Alokasi Umum merupakan transfer pemerintah pusat yang penggunaannya diserahkan penuh kepada pemerintah daerah. DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Dalam pasal 51 PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyebutkan bahwa DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. Dana perimbangan selain ditujukan untuk konsolidasi desentralisasi fiskal dan memperkecil ketimpangan keuangan antara pusat dan daerah serta antar daerah dengan tetap menjaga netralitas fiskal, juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan daerah.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah daerah di Kabupaten Manokwari.
2. Diduga Transfer Pemerintah Pusat (X_2) berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah daerah di Kabupaten Manokwari.
3. Diduga Jumlah Penduduk (X_3) berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah daerah di Kabupaten Manokwari.
4. Diduga bahwa Tingkat Pengangguran (X_4) berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah daerah di Kabupaten Manokwari.

III. METODE ANALISIS

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data *time series* dengan periode tahun 2004-2013, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda dan Dispenda Kabupaten Manokwari.

Pengeluaran pemerintah daerah di Kabupaten Manokwari dianalisis dengan menggunakan metode regresi linier berganda, hal ini karena variabel independen yang digunakan dalam analisis ini lebih dari satu variabel. Model yang dibangun dalam penelitian ini secara matematis dapat ditulis dengan formula sebagai berikut:

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \alpha_4 X_4 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Manokwari (Rp)
- X₁ = Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manokwari (Rp)
- X₂ = Transfer Pemerintah Pusat (Rp)
- X₃ = Jumlah Penduduk (jiwa)
- X₄ = Tingkat Pengangguran (jiwa)
- α₀ = Konstanta
- α₁ - α₄ = Koefisien Regresi
- e = Variabel Gangguan

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen, dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah pengeluaran pemerintah, dipilihnya variabel ini karena penulis tertarik untuk melihat perkembangan fluktuasi variabel ini terkait dengan perilaku variabel bebas yang dimasukkan dalam model penelitian. Variabel ini diproksi dengan belanja daerah dalam satuan rupiah.

Variabel Independen, dalam penelitian ini digunakan empat variabel independen yakni: pendapatan asli daerah (X₁) dalam satuan rupiah, transfer pemerintah pusat (X₂) dalam satuan rupiah, jumlah penduduk (X₃) dalam satuan jiwa dan tingkat pengangguran (X₄) dalam satuan jiwa.

Dalam penelitian ini, sebelum model dianalisis lebih lanjut terlebih dahulu akan dilakukan uji ketepatan model yang digunakan dengan menggunakan uji MWD (Mackinnon, White & Davidson) setelah diperoleh model yang tepat maka selanjutnya akan dilakukan regresi. Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat apakah hasil regresi yang diperoleh terbebas dari perilaku BLUE, uji asumsi klasik terdiri dari uji White untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas, uji LM untuk mendeteksi adanya otokorelasi. Uji

statistik dilakukan untuk melihat pengaruh variabel secara individual dengan uji-t dan secara bersama dengan uji F serta melihat berapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel-variabel yang dimasukkan dalam model dengan koefisien determinasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam persamaan 1 akan dilakukan pengujian MWD untuk menentukan apakah model yang digunakan merupakan persamaan linier atau persamaan log linier. Untuk melakukan uji MWD ini diasumsikan bahwa:

H_0 : Y adalah fungsi linier dari variabel independen X (model linier)

H_1 : Y adalah fungsi log linier dari variabel independen X (model log linier)

Uji MWD yang dilakukan sesuai dengan prosedur yakni estimasi model linier dan model log linier dan dapatkan nilai prediksinya (*fitted value*) selanjutnya dapatkan nilai Z_1 dan Z_2 dan lakukan estimasi regresi dengan memasukan nilai Z_1 dalam persamaan linier dan nilai Z_2 dalam persamaan log linier. Jika nilai Z_1 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis nol sehingga model yang tepat adalah log linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis nol sehingga model yang tepat adalah linier. Jika Z_2 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis alternatif sehingga model yang tepat adalah linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis alternatif sehingga model yang benar adalah log linier. Hasil estimasi dari uji MWD adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Mackinnon White and Davidson

Variabel	Nilai t-hitung	Nilai t-tabel	Probabilitas
Z_1	5.901364	1,812	0.001034
Z_2	1.557231	1,812	0.083051

Sumber: data diolah

Berdasarkan pada hasil regresi uji MWD, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara kedua bentuk persamaan (model linier dan log linier). Model persamaan linier kurang baik untuk diterapkan sehingga dalam penelitian ini menggunakan model persamaan log linier karena secara statistik signifikan dengan bentuk persamaan sebagai berikut:

$$\ln Y = \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_1 + \alpha_2 \ln X_2 + \alpha_3 \ln X_3 + \alpha_4 \ln X_4 + e \dots \dots \dots (2)$$

Setelah diperoleh model persamaan yang baik maka selanjutnya dilakukan regresi dengan menggunakan bentuk fungsi tersebut yakni model persamaan 2. Dengan hasil regresi sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Regresi Persamaan 2

Dependent Variable: lnY				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
lnX1	0.130167	0.078502	3.384288	0.0466
lnX2	1.234639	0.110366	11.18677	0.0001
lnX3	0.691896	0.374633	1.846865	0.1240
lnX4	0.029685	0.042490	0.698626	0.0959
C	1.792910	1.735768	1.032920	0.3490
R-squared	0.987942	Mean dependent var		27.16144
Adjusted R-squared	0.978296	Durbin-Watson stat		1.937132
F-statistic	102.4197	Prob(F-statistic)		0.000055

Sumber: data diolah

Hasil regresi pada tabel 2 menunjukkan bahwa dari empat variabel independen yang dimasukkan dalam model, hanya terdapat dua variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengeluaran pemerintah yakni pendapatan asli daerah dengan probabilitas 4,6 persen $< \alpha = 5$ persen dan transfer pemerintah pusat dengan probabilitas sebesar 0,01 persen $< \alpha = 5$ persen. Sedangkan variabel jumlah penduduk dan tingkat pengangguran kurang signifikan mempengaruhi pengeluaran pemerintah.

Uji Asumsi Klasik

Pelanggaran asumsi homoskedastisitas, uji White digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dengan hasil dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Hasil Uji White

<i>White Heteroskedasticity Test:</i>			
<i>F-statistic</i>	0,387519	<i>Probability</i>	0,246685
<i>Obs*R-squared</i>	22,00621	<i>Probability</i>	0,269957

Sumber: data diolah

Hasil uji White menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak terindikasi adanya masalah heteroskedastisitas, hal ini terlihat dari nilai probabilitas chi-square yang lebih besar dari $\alpha = 5$ persen yakni 26,9 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Pengujian otokorelasi, uji LM digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi adanya masalah otokorelasi. Hasil pengujian otokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Hasil Uji *Lagrange Multiplier*

<i>Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:</i>			
<i>F-statistic</i>	0,562201	<i>Probability</i>	0,270051
<i>Obs*R-squared</i>	9,001871	<i>Probability</i>	0,328109

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil pengolahan dengan menggunakan uji LM diperoleh bahwa nilai chi-square adalah sebesar 32,8 persen lebih besar dari $\alpha = 5$ persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi otokorelasi dalam penelitian ini.

Uji Statistik

Uji t, dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh suatu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (X_1) secara signifikan mempengaruhi variabel pengeluaran pemerintah dengan nilai probabilitas 4,66 persen; variabel transfer pemerintah pusat (X_2) secara signifikan mempengaruhi pengeluaran pemerintah dengan nilai probabilitas 0,01 persen. Sedangkan variabel jumlah penduduk dan variabel tingkat pengangguran tidak signifikan mempengaruhi pengeluaran pemerintah dengan nilai probabilitas masing-masing adalah 12,4 persen dan 9,5 persen.

Uji F, dilakukan untuk melihat apakah semua variabel yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 2 menunjukkan bahwa semua variabel independen yang dimasukkan dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat hal ini terlihat dari nilai probabilitas sebesar 0,0055.

R^2 , untuk melihat kualitas model yang digunakan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai R^2 adalah sebesar 0,98794 artinya model yang digunakan dalam penelitian ini cukup baik dalam menerangkan variasi variabel terikat sebesar 98 persen dan sisanya ditentukan oleh variabel lain di luar model.

Analisis Ekonomi

Dari empat variabel yang dimasukkan dalam model yakni pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran hanya terdapat dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah yakni, variabel pendapatan asli daerah dan transfer pemerintah pusat sedangkan jumlah

penduduk dan tingkat pengangguran tidak signifikan mempengaruhi pengeluaran pemerintah.

Nilai koefisien regresi yang melekat pada masing-masing variabel menunjukkan elastisitas perubahan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien regresi pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,13 yang berarti bahwa apabila pendapatan asli daerah meningkat 1 persen maka pengeluaran pemerintah akan naik sebesar 0,13 persen. Nilai koefisien regresi transfer pemerintah pusat adalah sebesar 1,23 yang mengindikasikan bahwa apabila transfer pemerintah pusat naik sebesar 1 persen maka pengeluaran pemerintah akan meningkat sebesar 1,23 persen. Tingginya elastisitas perubahan dari transfer pemerintah pusat terhadap pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Manokwari menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi sehingga perlu dilakukan langkah penggalan sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari PAD serta melakukan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program-program kegiatan dalam rangka mereduksi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini adalah baik, setelah melalui uji MWD maka diperoleh model yang tepat adalah model log linier. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dari empat variabel independen yang digunakan hanya terdapat dua variabel yang signifikan mempengaruhi pengeluaran pemerintah yakni pendapatan asli daerah dan transfer pemerintah pusat sedangkan variabel jumlah penduduk dan tingkat pengangguran tidak signifikan dalam mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah.

b. Saran

Disarankan bahwa pemerintah daerah sebaiknya mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang baru atau menggali lebih dalam lagi sumber penerimaan dari PAD dengan melakukan efisiensi dan efektivitas anggaran berdasarkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik maka bukan tidak mungkin apabila tingkat

ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam dana transfer pemerintah pusat dapat dikurangi dri waktu ke waktu.

REFERENSI

Arief Sritua, 1993, Metodologi Penelitian Ekonomi, UI-Press, Jakarta.

Arsyad Lincolin, 2004, Ekonomi Pembangunan, Edisi ke-4, cetakan ke-2, STIE-YKPN, Yogyakarta.

Boediono., 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Nomor 4*, Edisi 1, BPFE, Yogyakarta.

Gujarati, Damodar N., 2003. *Basic Econometrics*, Third Edition, Mc.Graw – Hill International Edition.

Insukindro, 1993, Penyusunan Model Ekonomi, Pusat Antar Universitas Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kuncoro M., 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Erlangga.

Widarjono Agus, 2007, Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi kedua, Penerbit Ekonisia, FE UII, Yogyakarta

Wiralaga, Harya Kuncara, 2005, “Pengaruh Transfer Antar Pemerintah terhadap Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah, Pertumbuhan dan Dispartitas Pendapatan Regional Kota dan Kabupaten di Indonesia, 1988-2003”, *Disertasi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.